



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/426/RB.06/2021
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2020

31 Maret 2021

Yth. **Bupati Tegal**
di

Slawi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tegal.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

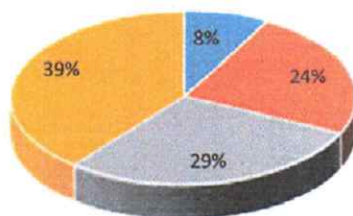
1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemkab Tegal tahun 2020 adalah **64,21** dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	11,14
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,36
	III. Reform	3,00	17,07
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,57
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,30
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,58
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,18
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,60
	Total Komponen Hasil	40,00	32,64
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	64,21

- h. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM antara lain mengenai, tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi;
- i. Pemkab Tegal telah membangun aplikasi SAKIP yang terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) serta monitoring capaian kinerja (*e-SAKIP*), namun pengintegrasian yang ada belum sempurna, sehingga pemanfaatannya pun belum maksimal;
- j. Penguatan kebijakan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan antara lain, penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- k. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*;
- l. Implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan dalam hal sistem kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat baru diberlakukan kepada sebagian kecil OPD.

3. Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hasil survei internal terhadap 100 responden pegawai Pemkab Tegal atas **kapasitas organisasi** menunjukkan **indeks 2,65** (skala 4). Secara



- Tidak memahami kinerja, ukuran, dan kontribusi
- Hanya memahami kinerjanya
- memahami kinerja dan ukuran kinerja atau kontribusi terhadap organisasi
- memahami kinerja, ukuran kinerja, dan kontribusi terhadap organisasi

keseluruhan, sebanyak **39%** responden memahami kinerjanya, ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan **61%** responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukuran kinerja, atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi.

- b. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemkab Tegal menunjukkan hasil yang baik dengan nilai SAKIP 61,36/Predikat B tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan predikat WTP dari BPK pada tahun 2019;
- c. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemkab Tegal menunjukkan hasil.

7. Optimalisasi penerapan *E-Government* dilingkungan Pemkab Tegal dengan menyusun *Grand Design* pengembangan SPBE serta pengintegrasian beberapa aplikasi;
8. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai atau *HCDP* secara menyeluruh dan memetakan *talenta/talent pool* sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;
9. Penyempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP yang terintegrasi di seluruh OPD yang merupakan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis *outcome*;
10. Optimalisasi penguatan kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
11. Optimalisasi peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*;
12. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat OPD dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada *stakeholder* serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tegal. Kami menghargai upaya Bupati Tegal beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemkab Tegal.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Agus Uji Hantara

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.